



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	20 Februari 2025	Media	Koran Padang
Kategori	KETENAGAKERJAAN	Jurnalis	ant

Harian Umum

KORAN PADANG

Berani Menyampaikan Santun Mengkritis

KLIPING KORAN

HARI : Kamis
TANGGAL : 20 Februari 2025

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kontrak Guru PPPK di Pariaman Diperpanjang Hingga Pensiun



PENJABAT Wali Kota Pariaman, Roberia saat pengukuhan 132 guru PPPK di Pariaman, Rabu (19/2).

PARIAMAN, KP - Pemerintah Kota Pariaman menyamakan masa kontrak guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di daerah itu dengan pegawai negeri sipil (PNS) dari yang sebelumnya hanya beberapa tahun menjadi sampai batas usia pensiun.

"Ur.dang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menegaskan hak PPPK sama dengan PNS," kata Penjabat Wali Kota Pariaman, Roberia saat pengukuhan 132 guru PPPK di Pariaman, Rabu (19/2).

la mengatakan, dalam undang-undang tersebut sudah ditegaskan bahwa PPPK memiliki hak yang sama dengan PNS, bekerja sampai dengan batas usia pensiun bahkan mendapatkan hak pensiun.

Menurut dia, karena sudah ada aturan tersebut maka mustahil bagi dirinya untuk tidak menjalankan aturan itu padahal memiliki kewenangan menjalankannya.

"Kalau tidak saya jalankan maka saya masuk ke dalam orang yang zalim, padahal saya memiliki kewenangan," katanya.

la menyampaikan, pada kesempatan itu Pemko Pariaman tidak saja memberikan hak un-

tuk PPPK yang sudah lama mengabdikan namun juga mempercepat pemberian Surat Keputusan bagi PPPK yang akan dilantik Desember 2025.

"Saya tidak ingin jadi orang yang batil, orang yang zalim. Sudah tahu diberi hak, saya tahu ilmunya dan sudah tahu kebijakannya kemudian saya diaman," ujarnya.

Pengukuhan tersebut dilakukan beriringan dengan dilantiknya 588 tenaga honorer di lingkungan pemerintah setempat menjadi PPPK.

Usai pelantikan, Pj Wako Pariaman meminta peserta pelantikan dan pengukuhan untuk melakukan salat Zuhur berjemaah di lokasi kegiatan yang merupakan halaman Kantor Wali Kota Pariaman.

Pada kesempatan itu ia meminta kepada PPPK dan seluruh PNS di daerah itu untuk meningkatkan kedisiplinan dan bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku bahkan menekankan agar tidak korupsi.

Terpisah, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman, Fuadi mengatakan, pengangkatan PPPK teknis dilakukan hari ini kontraknya sudah sampai batas usia pensiun. (ant)



PEMERINTAH KOTA PARIAMAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat: Jl. Imam Bonjol No 44 Pariaman, Desa Cimparuah, Kecamatan Pariaman
Tengah Kota Pariaman, 25511

Website: //diskominfo.pariamankota.go.id E-mail: diskominfo@pariamankota.go.id

Tanggal	20 Februari 2025	Media	Koran Padang
Kategori	PEMERINTAHAN	Jurnalis	ant

Harian Umum

KORAN PADANG

Berani Menyampaikan Santun Mengkritis

KLIPING KORAN

HARI : Kamis
TANGGAL : 20 Februari 2025

PEMERINTAH KOTA PARIAMAN - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Wako Roberia Ungkap Alasan 420 Guru Gagal Ikut Seleksi PPPK

PARIAMAN, KP - Penjabat (Pj) Wali Kota Pariaman, Roberia, menyampaikan penjelasan terkait 420 guru yang sudah berstatus Pendidikan Profesi Guru (PPG) gagal mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang formasinya dibuka secara khusus oleh Pemko Pariaman beberapa

BERSAMBUNG KE HAL. 11

■ Wako Roberia

waktu lalu.

"Mereka satu jam pun tidak mengajar di Pariaman, lalu saya luluskan? Saya tidak mau menjadi orang yang kemudian menanggung beban itu," kata Roberia, saat menjawab pertanyaan wartawan, pada pelantikan 588 orang tenaga honorer jadi PPPK yang mengikuti seleksi pada tahap I, di Balai Kota Pariaman, Rabu (19/2).

Ia mengungkapkan, jajarannya mencoba meloloskan ratusan guru tersebut namun dirinya menegaskan kepada jajarannya untuk menjadikan mereka tidak memenuhi syarat (TMS). Sebab, ratusan guru PPG yang banyak berasal dari luar daerah, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Riau dan sebagian dari Sumbar itu tidak mengajar di SD dan SMP negeri di Pariaman.

Ratusan guru PPG itu, lanjutnya, mendaftar karena mendapatkan informasi bahwa Pariaman salah satu daerah di Sumbar yang membuka seleksi PPPK guru PPG.

Padahal, kata Roberia, pengangkatan PPPK di Pariaman yang dilakukan saat ini khusus untuk tenaga honorer yang sudah mengabdikan dirinya untuk daerah itu baik yang berpendidikan tinggi maupun tamatan SD.

"Jadi sejak awal saya tidak membuka ruang itu (penerimaan guru PPG yang belum mengabdikan diri di Pariaman)," katanya.

"Tenaga honorer yang baru satu tahun meng-

abdikan di Pariaman saja dijadikan TMS, apalagi yang belum pernah mengabdikan dirinya," imbuhnya.

Ia menyampaikan, dirinya sering berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan PPG sehingga dirinya mengambil kesimpulan adanya kesalahan pemahaman produk kebijakan dari kementerian terkait guru PPG tersebut.

Selain itu, lanjutnya, ratusan guru PPG tersebut mendaftar pada tahap II yang pada dasarnya saat ini masih dalam tahapan masa sanggah.

Ia mengatakan, jika Pemko Pariaman menerima pendaftaran 420 orang guru PPG tersebut dan sekitar 100 orang di antaranya saja yang lulus, maka pihaknya akan kesulitan memposisikan mereka di sekolah negeri di daerah itu yang jumlahnya terbatas.

"Jadi masyarakat banyak yang tidak tahu, mereka ikut seleksi tahap II. Bagaimana mereka dilantik sedangkan mereka tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi," tambahnya.

Untuk diketahui, perwakilan guru PPG tersebut telah audiensi dengan Pj Wako Pariaman beberapa hari yang lalu.

Namun di sejumlah media sosial disampaikan oleh oknum tertentu guru yang mengikuti PPPK di Pariaman batal dilantik. Hal tersebut sempat memicu komentar negatif terhadap Pemko Pariaman. (ant)

